

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN  
SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka guna pedoman penetapan alokasi dan besaran, penyaluran dan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pekalongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 39 Tahun 2014);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 57);
15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);

16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 60);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa lainnya.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Pengalokasian ADD adalah besaran ADD yang diterima oleh Desa.
13. Penyaluran ADD adalah proses pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah yang disingkat RKUD ke Rekening Kas Desa yang disingkat RKD.
14. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
19. RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.
20. Rekening Kas Desa yang disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang PemerintahanDesa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untukmembayar seluruh pengeluaran Desa.
21. RPD adalah Rencana Penggunaan Dana.

## BAB II PENGELOLAAN ADD

### Pasal 2

ADD dianggarkan dalam APBD setiap tahun.

### Pasal 3

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

### Pasal 4

ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

## BAB III PRINSIP PENGGUNAAN ADD

### Pasal 5

ADD dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

### Pasal 6

ADD digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

### Pasal 7

Penggunaan ADD tertuang dalam APBDesa yang mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

### Pasal 8

Penetapan Rincian Besaran ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diberikan kepada Kepala Desa Non PNS, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Non PNS; dan
  - b. diberikan dengan alokasi besaran sebagai berikut:
    1. Kepala Desa paling banyak 2 (dua) kali penghasilan tetap Perangkat Desa per bulan;
    2. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
    3. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan paling banyak sebesar Rp1.575.000,00.
- (2) Selain untuk penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan ADD diprioritaskan untuk:
  - a. Premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat perseratus) terdiri dari 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah desa dan 3% (tiga perseratus) dari Penghasilan tetap dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 5% (lima perseratus) terdiri dari 3% (tiga perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah desa, dan 2% (dua perseratus) dari Penghasilan tetap dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - c. Operasional Kelembagaan Desa;
  - d. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak/penyelenggaraan pengisian perangkat Desa Tahun 2019; dan
  - e. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa.
- (3) Besaran tunjangan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa paling banyak 2 (dua) kali Tunjangan Perangkat Desa per bulan;

- b. Penjabat Kepala Desa paling banyak sesuai dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Golongan III yang berlaku pada kecamatan setempat;
  - c. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan Kepala Desa per bulan; dan
  - d. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa per bulan paling banyak sebesar Rp350.000,00.
- (4) Pemerintah Desa dapat menggunakan diluar prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kewenangan Desa apabila semua prioritas tersebut telah terpenuhi.

#### BAB IV PENYALURAN DAN PELAKSANAAN ADD

##### Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyaluran dan pencairan ADD dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

##### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa yang anggarannya bersumber dari ADD berpedoman pada pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Pengelolaan ADD dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Guna tertib administrasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian ADD dibentuk Pengelola ADD.
- (2) Pengelola ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten;
  - b. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan; dan
  - c. Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa.
- (3) Pembentukan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam Keputusan Camat.
- (5) Pembentukan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

## BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD setiap 3 (tiga) bulan kepada Camat selaku Ketua Tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan dengan melampirkan surat pertanggungjawaban.
- (2) Camat menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Ketua Tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten dengan tembusan Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan.
- (3) Penyampaian rekapitulasi laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya.

### Pasal 14

Dalam hal kepala Desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), maka penyaluran ADD tahap berikutnya ditunda sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi Desa; dan
  - b. Camat setempat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah/APIP); dan
  - b. Camat setempat.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 61

Salinan sesuai aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



Drs. ALI RIZA, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700408 199101 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,  
PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN  
SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

	Halaman
I. KEBIJAKAN UMUM ADD TAHUN ANGGARAN 2019	
A. LATAR BELAKANG.....	2
1. Landasan Pemikiran.....	2
2. Maksud Dan Tujuan .....	2
3. Kebijakan Pemberian Alokasi Dana Desa .....	2
B. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA .....	2
1. Pengelola ADD .....	3
2. Struktur Tim dan Tugas Pengelola Alokasi Dana Desa .....	3
C. Mekanisme Pengajuan Alokasi Dana Desa .....	6
D. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa .....	8
E. Pengenaan Pajak pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa .....	8
F. Pelaporan dan Pertanggungjawaban .....	12
G. Pengawasan Alokasi Dana Desa .....	13
H. Penutup.....	13
II. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA	
A. FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN.....	14
B. FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN.....	15
C. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ADD.....	16
III. RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA	

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



Drs. ALI RIZA, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700408 199101 1 001

## I. KEBIJAKAN UMUM ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

### A. LATAR BELAKANG

#### 1. Landasan Pemikiran.

Bahwa pemberian ADD merupakan wujud dari pengakuan Pemerintah kepada Desa agar dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dalam mencapai sasaran menjadikan Desa maju, mandiri, masyarakat makmur dan sejahtera.

Bahwa pada bagian keenam Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan *"Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD"*.

Maka guna pedoman penyaluran, penetapan rincian tiap Desa dan penggunaan serta pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD, perlu diatur dengan pedoman teknis sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### 2. Maksud dan Tujuan.

##### a. Maksud

Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah guna petunjuk teknis penyaluran, penetapan rincian tiap Desa dan penggunaan serta pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD tepat sasaran, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### b. Tujuan

- 1) memberikan petunjuk bagi para pelaku ADD agar dalam pelaksanaannya tidak salah arah dan tujuan;
- 2) memberikan kejelasan dan kemudahan pelaku kegiatan ADD dalam pelaksanaan administrasi dan keuangan ADD;
- 3) dapat mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan lain dari sumber pendapatan Desa yang lain;
- 4) memberikan gambaran agar penggunaan dana ADD sesuai dengan peruntukannya; dan
- 5) menjamin terlaksananya pencapaian sasaran ADD.

#### 3. Kebijakan Pemberian ADD.

a. Pengalokasian kepada Pemerintah Desa diutamakan untuk pembayaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan sisanya setelah Penghasilan tetap terpenuhi 12 bulan dan selebihnya dapat digunakan untuk belanja Desa lainnya; dan

b. Rencana penggunaan ADD Non Siltap melalui hasil Musyawarah Desa (Musdes).

## B. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

### 1. Pengelola ADD terdiri dari:

#### a. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten.

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Penasehat : Bupati.
- 2) Wakil Penasehat : Wakil Bupati.
- 3) Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
- 4) Wakil Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda.
- 5) Ketua : Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB.
- 6) Wakil Ketua : Sekretaris Dinas PMD, P3A dan PPKB.
- 7) Sekretaris : Kepala Bidang Admininstrasi dan Penataan Pemerintahan Desa Dinas PMD, P3A dan PPKB.
- 8) Anggota : Perangkat Daerah terkait, meliputi:
  - a) Inspektorat;
  - b) BAPPEDA LITBANG;
  - c) BPKD;
  - d) Bagian Hukum Setda;
  - e) Dinas PMD,P3A dan PPKB.

#### b. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan.

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Ketua : Camat.
- 2) Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
- 3) Sekretaris : Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum.
- 4) Anggota : Paling banyak 4 (empat) orang dengan salah satu anggota dari unsur Perangkat Daerah teknis diwilayah Kecamatan yang bersangkutan.

#### c. Tim Pelaksana Tingkat Desa.

Tim Pelaksana Kegiatan ADD Tingkat Desa adalah bagian dari pelaksanaan APBDes yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, berlaku sejak awal tahun anggaran, terdiri dari:

- 1) Kepala Desa : selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- 2) Sekretaris Desa: selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- 3) Kasi / Kaur : selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sesuai dengan bidangnya.
- 4) Kaur Keuangan: menjalankan fungsi Kebendaharaan.

d. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Ketua : berasal dari unsur Perangkat Desa Kewilayahan (Kadus).
- 2) Sekretaris : dapat berasal dari unsur Perangkat Desa Kewilayahan/Lembaga Kemasyarakatan.
- 3) Anggota : dapat berasal dari unsur Perangkat Desa Kewilayahan/Lembaga Kemasyarakatan.

2. Struktur Tim dan Tugas Pengelola ADD

a. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten, mempunyai tugas:

- 1) menyusun Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan ADD;
- 2) melaksanakan bimbingan dan sosialisasi ADD;
- 3) menyusun alokasi besaran ADD tiap Desa ;
- 4) memfasilitasi penyaluran ADD;
- 5) melaksanakan pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
- 6) memfasilitasi pengaduan masyarakat dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait;
- 7) melaporkan hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desakepada Bupati Pekalongan melalui Sekretaris Daerah.

b. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan, mempunyai tugas:

- 1) memberikan sosialisasi dan informasi program ADD kepada seluruh Desa di wilayah Kecamatan masing-masing;
- 2) memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa/Rencana Penggunaan Dana (RPD) dalam setiap kegiatan yang meliputi waktu pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kegiatan sederhana;
- 3) Camat selaku ketua Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desatingkat Kecamatan merekomendasi usulan penyaluran Alokasi Dana Desasetiap tahapan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Camat selaku ketua Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa tingkat Kecamatan memverifikasi kelengkapan berkas pencairan Alokasi Dana Desapada Rekening Kas Desa di Bank Pemerintah, berdasarkan pengajuan SPP dari Rencana Penggunaan Dana (RPD) masing-masing kegiatan sebagai wujud pengendalian dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa setiap tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten; dan

- 7) menyampaikan rekap laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB tiap Tribulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- c. Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa, mempunyai tugas:
- 1) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
    - a) memberikan sosialisasi/informasi rencana program kegiatan Alokasi Dana Desa kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat sekurang-kurangnya melalui info grafis yang ditempatkan pada kantor Pemerintah Desa;
    - b) menyusun laporan pertanggungjawaban setiap tahapan pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c) mengembangkan peran serta masyarakat dan swadaya masyarakat.
    - d) Mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.
  - 2) Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
    - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
    - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
    - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
    - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
    - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
    - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
    - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
    - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
    - i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
  - 3) Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Kegiatan sesuai dengan bidangnya, dengan uraian tugas sebagai berikut:
    - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
    - b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
    - c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
    - d) menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
    - e) menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) masing-masing kegiatan yang memuat RAB, lokasi dan lama waktu pelaksanaan.

- f) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - g) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
  - h) untuk kegiatan konstruksi dibuat RAB dan Gambar Sederhana untuk ditandatangani oleh PKA dan disetujui oleh Kepala Desa. Sedangkan konstruksi yang bersifat kompleks dapat melakukan konsultasi dengan Unit Teknis.
  - i) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa setiap bulannya; dan
- d. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a) menyusun RAK Desa;
  - b) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
  - c) mempertanggungjawabkan keuangan Alokasi Dana Desa melalui laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) menyusun Rencana Anggaran Biaya Barang/Jasa yang melibatkan pihak penyedia;
  - b) menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis Barang/Jasa yang melibatkan pihak penyedia;
  - c) melaksanakan pengadaan Barang/Jasa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
  - d) menandatangani Surat Perjanjian bersama penyedia; dan
  - e) melaporkan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- f. Untuk seluruh kegiatan yang bersumber dari ADD berpedoman pada Standarisasi Biaya umum Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019.

### C. MEKANISME PENGAJUAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

Mekanisme pengajuan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan secara bertahap setiap tiga bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### 1. Tingkat Desa:

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB melalui Camat setempat, dengan dilampiri:

#### Tahap I

- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah ditetapkan dan dicetak menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- b. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- c. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- d. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran;
- e. Laporan Realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
- f. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahun 2019.

#### Tahap II

- a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- c. laporan realisasi dilengkapi surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap I.
- d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II.

#### Tahap III

- a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- c. laporan realisasi dilengkapi surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap II.
- d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III.

#### Tahap IV

- a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- c. laporan realisasi dilengkapi surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap III.
- d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap IV.

#### 2. Tingkat Kecamatan:

- a. Memberi rekomendasi permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai tahapan, dengan cara:
  - 1) memastikan bahwa kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sudah tercantum dalam Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019;
  - 2) mengoreksi kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa; dan

- b. meneruskan permohonan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB setelah persyaratan lengkap dan sesuai ketentuan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa.
3. Tingkat Kabupaten:
- a. Dinas PMD, P3A dan PPKB mengajukan permohonan persetujuan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati berdasarkan permohonan Kepala Desa yang telah direkomendasi oleh Camat; dan
  - b. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPKD melakukan penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

#### D. MEKANISME PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA.

Pencairan ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan dengan cara :

1. pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD, dan disetujui oleh Kepala Desa; dan
2. Kepala Desa mengajukan permohonan Pencairan ke Rekening Kas Desa di Bank Pemerintah, dilampiri Berita Acara Verifikasi dari Camat atas bukti penerimaan dan pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. PENGENAAN PAJAK PADA PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA.

1. Kewajiban perpajakan Bendahara Desa atas penggunaan dana APBDes adalah melakukan pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran pajak ke kas negara serta pelaporan pajak menggunakan SPT Masa setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
2. Tata Cara Pemotongan/Pemungutan Pajak.

##### a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada prinsipnya semua barang dan jasa dikenakan PPN kecuali yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara Desa mengenakan PPN apabila pembayaran atas pengadaan/pembelian barang/jasa yang nilainya melebihi Rp1.000.000,00 (nilai termasuk PPN terutang), baik kepada penyedia barang/jasa yang Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun kepada penyedia barang/jasa Bukan PKP. Salah satu ciri dari penyedia barang/jasa PKP adalah penyedia barang/jasa tersebut membuat Faktur Pajak.

Rumus menghitung PPN = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif

✓ Penyedia barang/jasa PKP =  $(100/110 \times \text{Nilai Pembayaran}) \times 10\%$ ; dan

✓ Penyedia barang/jasa Bukan PKP =  $\text{Nilai Pembayaran} \times 10\%$ .

##### b. PPh Pasal 22

Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang yang nilainya melebihi Rp2.000.000,00, selain dikenakan PPN sebesar 10% (sepuluh perseratus), maka Bendahara Desa juga mengenakan PPh Pasal 22 atas pembayaran tersebut. Besarnya tarif PPh Pasal 22 adalah 1,5%, (satu koma lima perseratus) apabila penyedia barang mempunyai NPWP. Apabila penyedia barang tidak mempunyai

NPWP ataupun tidak memberikan NPWP maka tarif PPh Pasal 22 adalah 3% (tiga perseratus).

Rumus menghitung PPh Pasal 22 adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif, dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Penyedia barang/jasa PKP =  $(100/110 \times \text{Nilai Pembayaran}) \times 1,5\%$ ;
- ✓ Penyedia barang/jasa Bukan PKP ber-NPWP = Nilai Pembayaran x 1,5%; dan
- ✓ Penyedia barang/jasa Bukan PKP tidak ber-NPWP = Nilai Pembayaran x 3%.

Apabila Penyedia barang/jasa memberikan dokumen berupa Fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) yang telah dilegalisir oleh KPP, maka Bendahara Desa tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22.

c. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pembayaran berupa honorarium, uang lembur, uang transport atau penghasilan dengan nama apapun dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 5% (lima perseratus) tanpa PTKP bagi yang memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP dikenakan sebesar 6% (enam perseratus) tanpa PTKP.

Pembayaran berupa penghasilan tetap yang rutin dibayarkan setiap bulan, penghitungan pajaknya menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

d. PPh Pasal 23

Pembayaran kepada penyedia barang/jasa berkaitan dengan jasa dan sewa perlengkapan/peralatan dikenakan PPh Pasal 23. Rumus menghitung PPh Pasal 23 adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif, dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Penyedia barang/jasa PKP =  $(100/110 \times \text{Nilai Pembayaran}) \times 2\%$ ;
- ✓ Penyedia barang/jasa Bukan PKP ber-NPWP = Nilai Pembayaran x 2%; dan
- ✓ Penyedia barang/jasa Bukan PKP tidak ber-NPWP = Nilai Pembayaran x 4%.

Apabila pembayarannya melebihi Rp1.000.000,00, maka Bendahara Desa juga mengenakan PPN sebesar 10%.

Apabila Bendahara Desa memperoleh Fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) yang telah dilegalisir oleh KPP dari penyedia barang/jasa, maka Bendahara Desa tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23.

e. PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Pembayaran berkaitan dengan sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10 % (sepuluh persen) dari nilai pembayaran.

3. Tata Cara Penyetoran Pajak.

- a. Batas waktu Penyetoran PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah masa pajak berakhir. Surat Setoran Pajaknya menggunakan NPWP Bendahara Desa.
- b. Batas waktu penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 adalah paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pembayaran. Surat Setoran Pajak menggunakan NPWP penyedia barang/jasa apabila PKP. Apabila penyedia barang/jasa bukan PKP ataupun tidak menunjukkan NPWP, setoran pajaknya menggunakan NPWP Bendahara Desa.
- c. Keterlambatan penyetoran pajak, Bendahara Desa dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per-bulan, yang akan ditagih oleh KPP menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP).

4. Tata Cara Pelaporan Pajak.

Bendahara Desa diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT Masa pada setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas pajak-pajak yang sudah disetorkan ke Kas Negara, dengan ketentuan:

- a) Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23 dan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) adalah tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
  - b) Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
  - c) Apabila tidak lapor atau terlambat melaporkan SPT Masa setiap bulannya, Bendahara Desa dapat dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 untuk setiap SPT Masa Pajak Penghasilan dan denda sebesar Rp500.000,00 untuk setiap SPT Masa PPN, yang akan ditagih oleh KPP menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP).
5. Kegiatan penyediaan makan dan minuman dikenakan Pajak Daerah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dan dibayarkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Pengenaan bea meterai pada pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Bea meterai dalam pengelolaan keuangan Desa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang memuat jumlah uang, ketentuannya adalah:
  - 1) transaksi sampai dengan nilai nominal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan bea meterai;
  - 2) transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan bea meterai sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); dan

- 3) transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan bea meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
  - b. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan bea meterai sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah).
7. Penatausahaan.
- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
  - b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
  - c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
  - d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
  - e. Pengenaan pajak pada pelaksanaan kegiatan ADD:
    - 1) Pembelian/pengadaan barang yang bernilai minimal Rp1.000.000,00 hanya dikenakan PPN sebesar 10%. Sedangkan untuk pengadaan barang minimal sebesar Rp2.000.000,00 dikenai PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%, bagi penyedia barang yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 3% dengan cara penghitungan sebagai berikut:
      - ✓  $PPN = (100/110 \times \text{Nilai Nominal}) \times 10\%$  (PKP)
      - ✓  $10\% \times \text{Nominal}$  (Non PKP)
      - ✓  $PPh \text{ Pasal } 22 \text{ (ber NPWP)} = (100/110 \times \text{Nilai Nominal}) \times 1,5\%$  (PKP)  $1,5\% \times \text{Nominal}$  (Non PKP)
      - ✓  $PPh \text{ Pasal } 22 \text{ (tidak ber NPWP)} = (100/110 \times \text{Nilai Nominal}) \times 3\%$  (PKP)  $3\% \times \text{Nominal}$  (Non PKP)
 Untuk pembayaran pajak menginduk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia barang/toko/Bendahara Desa.
    - 2) Pengenaan pajak berupa honorarium, uang lembur dikenakan pemotongan PPhPs. 21 sebesar 5% bagi yang memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPhPs. 21 sebesar 6%, untuk pembayaran pajak menginduk pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
    - 3) Pengenaan pajak jasa dan sewa perlengkapan/peralatan dikenakan PPhpsl 23 sebesar:
      - a) Sebesar 2% dari transaksi bagi yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh sebesar 4%;
      - b) Rp1.000.000,00 keatas dikenakan PPN 10% dan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a;
      - c) Pajak dibayar paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah transaksi; dan
      - d) Bendahara wajib melaporkan pajak-pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak.

- 4) Kegiatan penyediaan makan dan minuman dikenakan pajak daerah sebesar 10% dan dibayarkan melalui BPKD Kabupaten Pekalongan.
8. Pengenaan bea meterai pada pelaksanaan kegiatan ADD.  
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarannya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Ketentuan bea meterai dalam pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:
    - a. Transaksi sampai dengan nilai nominal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan bea meterai;
    - b. Transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan bea meterai sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); dan
    - c. Transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan bea meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

#### F. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Laporan SPJ dibuat oleh Kepala Desa mengacu pada format Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan pedoman pada ketentuan yang berlaku disampaikan kepada Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan. SPJ dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan SPJ asli disimpan di Desa, dan salinan SPJ diserahkan ke Camat;
2. Camat melakukan penelitian SPJ yang diterima dari Desa sebagaimana point 1;
3. Apabila dari hasil penelitian SPJ ditemukan ada kekurangan lampiran atau bukti pengeluaran keuangan maka Kepala Desa wajib untuk melengkapi kekurangannya, dan apabila ditemukan SPJ tidak sesuai antara rencana penggunaan dengan realisasinya, maka Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan mengadakan klarifikasi langsung ke Desa paling lambat 10 (sepuluh ) hari kerja setelah SPJ diterima;
4. Apabila hasil klarifikasi langsung ke Desa ditemukan adanya penyimpangan, maka Camat mengembalikan SPJ kepada Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan;
5. Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD (tanpa dokumen SPJ) kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada point 1.

#### G. PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA.

1. Pengawasan pelaksanaan ADD dilakukan oleh:
  - a. Pengawasan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan secara umum berupa kritik dan saran yang bersifat membangun; dan
  - b. Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten.
2. Dalam hal terjadi persoalan/permasalahan pelaksanaan kegiatan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### H. PENUTUP.

Demikian Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2019, guna menjadi pedoman dan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan ADD di Kabupaten Pekalongan.

I. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

A. FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN ADD.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
KECAMATAN .....  
PEMERINTAH DESA .....  
Jln. .... Telp. .... Kode Pos .....

---

Nomor : .....  
Lamp. : .....  
Perihal : Permohonan Penyaluran  
ADD Tahap .... TA 20xx

....., ..... 20xx  
Kepada:  
Yth. Bupati Pekalongan  
cq. Kepala Dinas PMD, P3A DAN  
PPKB  
Lewat CAMAT .....

Di  
TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang APBDes Tahun 20..., yang didalamnya memuat kegiatan bersumber dari ADD sebesar Rp..... (.....), meliputi :

1. Tahap I, sebesar 25% : Rp.....
2. Tahap II, sebesar 25% : Rp. ....
3. Tahap III, sebesar 25% : Rp. ....
4. Tahap IV, sebesar 25% : Rp. ....

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan untuk Penyaluran ADD Tahap ... sebesar Rp..... (.....), untuk ditransfer ke:

Bank : .....  
Nomr Rekening : .....  
Atas Nama : Pemerintah Desa .....

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. Dst. ....

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Kepala Desa .....  
Kecamatan .....

Cap + Ttd

.....

B. FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN ADD.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
KECAMATAN .....  
Jln. .... Telp. .... Kode Pos .....

---

REKOMENDASI

Nomor :

TENTANG  
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP ...  
TAHUN ANGGARAN 2019

- a. Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2019.
- b. Sesuai surat permohonan Penyaluran ADD dari Kepala Desa..... Kecamatan ..... Nomor ..... Tanggal ....., dengan melampirkan persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
  1. ....;
  2. ....;
  3. Dst... (sesuai tahapan)
  4. SPJ Tahap ..... sudah diterima Kecamatan pada tanggal .....
- c. Untuk selanjutnya kami merekomendasikan penyaluran ADD tahap .. (... ) Tahun Anggaran 2019 untuk Desa ..... Kecamatan ..... sebesar Rp..... (.....)

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

....., ..... 20xx  
Camat .....

.....  
NIP.

C. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN ADD.

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI  
 PELAKSANAAN KEGIATAN ADD TAHUN ANGGARAN 2019  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN PEKALONGAN  
 TAHAP ....

No.	DESA	ANGGARAN	BID. I (Rp.)	BID. II (Rp.)	BID. III (Rp.)	BID. IV (Rp.)	BID.V (Rp.)	TOTAL (Rp.)	SISA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8	10=3-9	11
1.										
2.										
3.										
4.										
Dst.										

....., ..... 20xx  
 Camat .....

.....  
 NIP.

III. RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN / DESA	RINCIAN ADD PER DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7
	<b>KANDANGSERANG</b>					
1	Klesem	516,681,000	129,170,250	129,170,250	129,170,250	129,170,250
2	Bodas	485,176,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000
3	Gembong	548,186,000	137,046,500	137,046,500	137,046,500	137,046,500
4	Sukoharjo	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
5	Garungwiyoro	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
6	Bubak	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
7	Bojongkoneng	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
8	Luragung	485,176,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000
9	Kandangserang	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
10	Wangkelang	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
11	Lambur	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
12	Tajur	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
13	Trajumas	548,186,000	137,046,500	137,046,500	137,046,500	137,046,500
14	Karanggondang	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
	<b>PANINGGARAN</b>					
1	Wardi	516,681,000	129,170,250	129,170,250	129,170,250	129,170,250
2	Winduaji	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
3	Krandegan	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
4	Lumeneng	579,690,000	144,922,500	144,922,500	144,922,500	144,922,500
5	Tangeran	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
6	Kaliboja	485,176,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000
7	Kaliombo	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
8	Botosari	485,176,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000
9	Sawangan	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
10	Paninggaran	485,176,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000
11	Domiyang	548,186,000	137,046,500	137,046,500	137,046,500	137,046,500
12	Notogiwang	516,681,000	129,170,250	129,170,250	129,170,250	129,170,250
13	Lambanggehun	548,186,000	137,046,500	137,046,500	137,046,500	137,046,500
14	Tenogo	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
15	Bedagung	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
	<b>LEBAKBARANG</b>					
1	Tembelangunung	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
2	Pamutih	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
3	Depok	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
4	Wonosido	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
5	Timbangsari	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
6	Sidomulyo	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
7	Kutorembet	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
8	Lebakbarang	485,176,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000
9	Kapundutan	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
10	Bantar Kulon	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
11	Mendolo	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
	<b>PETUNGGRIYOHO</b>					
1	Simego	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
2	Sunggodadi	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
3	Curugmuncar	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
4	Gumelem	264,641,000	66,160,250	66,160,250	66,160,250	66,160,250
5	Tlogohendro	516,681,000	129,170,250	129,170,250	129,170,250	129,170,250
6	Yosorejo	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
7	Tlogopakis	516,681,000	129,170,250	129,170,250	129,170,250	129,170,250
8	Kasimpar	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
9	Kayupuring	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
	<b>TALUH</b>					
1	Mesoyi	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
2	Jolotigo	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
3	Sengare	485,176,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000
4	Donowangun	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
5	Taluh	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
6	Banjarsari	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
7	Kalirejo	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
8	Batursari	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
9	Karangasem	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
10	Krompeng	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
	<b>DORO</b>					
1	Pungangan	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
2	Sidoharjo	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
3	Lemahabang	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
4	Rogoselo	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
5	Harjosari	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
6	Larikan	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
7	Sawangan	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
8	Dororejo	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
9	Doro	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
10	Randusari	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
11	Kutosari	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
12	Wringinagung	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
13	Kalimojosari	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
14	Bligorejo	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750

NO	KECAMATAN / DESA	RINCIAN ADD PER DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7
	<b>KARANGANYAR</b>	-	-	-	-	-
1	Gutomo	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
2	Limbangan	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
3	Karangdandang	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
4	Lolong	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
5	Pedawang	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
6	Pododadi	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
7	Legokalong	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
8	Karangsari	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
9	Kulu	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
10	Banjarejo	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
11	Wonosari	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
12	Sokosari	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
13	Sidomukti	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
14	Kayugeritan	485,176,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000
15	Kutosari	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
	<b>KAJEN</b>	-	-	-	-	-
1	Tambakroto	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
2	Kutorjo	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
3	Linggoari	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
4	Brengkolang	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
5	Pringsurat	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
6	Sokoyoso	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
7	Sinangohprendeng	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
8	Kajongan	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
9	Pekiringanageng	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
10	Gandarum	485,176,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000
11	Sabarwangi	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
12	Kalijoyo	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
13	Wonorejo	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
14	Pekiringan Alit	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
15	Kutorejo	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
16	Nyamok	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
17	Tanjung Kulon	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
18	Tanjungsari	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
19	Gejlig	485,176,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000
20	Kebonagung	485,176,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000
21	Sangkanjoyo	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
22	Salit	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
23	Sambiroto	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
24	Rowolaku	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
	<b>KESKI</b>	-	-	-	-	-
1	Windurojo	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
2	Ujungnegoro	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
3	Brondong	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
4	Podosari	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
5	Kwasen	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
6	Langensari	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
7	Jagung	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
8	Watugajah	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
9	Karangrejo	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
10	Karyomukti	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
11	Keesai	485,176,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000
12	Srinahan	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
13	Kaibahan	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
14	Watupayung	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
15	Krandon	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
16	Ponolawen	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
17	Kalimade	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
18	Sidomulyo	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
19	Sukorejo	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
20	Sidosari	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
21	Mulyorejo	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
22	Pantirejo	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
23	Kwigeran	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
	<b>SRAGI</b>	-	-	-	-	-
1	Ketanonageng	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
2	Mrican	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
3	Bulaksari	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
4	Sumub Lor	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
5	Sumub Kidul	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
6	Kalijambe	485,176,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000
7	Purworejo	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
8	Kedungleran	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
9	Kunjukan	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
10	Gebangkerep	548,186,000	137,046,500	137,046,500	137,046,500	137,046,500
11	Purwodadi	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
12	Bulakpelem	485,176,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000
13	Tegaluruh	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
14	Krasakageng	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
15	Sjeruk	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
16	Tegalantar	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
	<b>BOJONG</b>	-	-	-	-	-
1	Bukur	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
2	Kalipancur	485,176,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000
3	Sumurjomblangbogo	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
4	Pantianom	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
5	Randumuktiwaren	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
6	Legokcile	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
7	Bojongwetan	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
8	Wangandowo	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750

NO	KECAMATAN / DESA	RINCIAN ADD PER DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7
9	Duwet	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
10	Ketintang Kidul	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
11	Menjangan	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
12	Ketintang Lor	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
13	Rejosari	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
14	Bojong Lor	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
15	Bojong Minggir	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
16	Wiroditan	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
17	Kemasan	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
18	Jajarwayang	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
19	Babalan Lor	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
20	Babalan Kidul	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
21	Karangsari	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
22	Sembungjambu	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
<b>WONOPRINGGO</b>						
1	Jetak Kidul	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
2	Sastrodirjan	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
3	Legokgunung	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
4	Galangpengampon	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
5	Kwagean	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
6	Cetas	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
7	Rowokembu	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
8	Wonopringgo	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
9	Sampih	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
10	Gondang	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
11	Wonorejo	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
12	Jetak Lengkong	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
13	Pegaden Tengah	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
14	Surobayan	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
<b>KEDUNGWUNI</b>						
1	Rowocacing	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
2	Langkap	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
3	Pajomblangan	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
4	Tosaran	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
5	Pakisputih	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
6	Kedungpatangewu	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
7	Podo	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
8	Kwayangan	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
9	Proto	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
10	Salakbrojo	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
11	Ambokembang	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
12	Tangkal Tengah	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
13	Tangkal Kulon	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
14	Karangdowo	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
15	Bugangan	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
16	Rengas	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
<b>BUARAN</b>						
1	Coprayan	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
2	Wonoyoso	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
3	Pakumbulan	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
4	Watusalam	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
5	Simbangwetan	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
6	Kertijayan	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
7	Paweden	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
<b>TIRTO</b>						
1	Wuled	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
2	Ngalian	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
3	Pandanarum	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
4	Karanganyar	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
5	Silihrejo	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
6	Pucung	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
7	Dadirejo	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
8	Sidarejo	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
9	Curug	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
10	Tanjung	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
11	Samborejo	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
12	Pacar	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
13	Karangjampo	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
14	Tegaldowo	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
15	Mulyorejo	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
16	Jerukeari	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
<b>WIRADESA</b>						
1	Kadipaten	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
2	Delegtukang	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
3	Karanglati	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
4	Petukangan	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
5	Wiradesa	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
6	Waru Kidul	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
7	Bondanari	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
8	Waru Lor	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
9	Kampil	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
10	Kemplong	264,641,000	66,160,250	66,160,250	66,160,250	66,160,250
11	Kauman	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
<b>SIWALAN</b>						
1	Mejasem	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
2	Wonosari	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
3	Tengeng Wetan	611,185,750	152,796,438	152,796,438	152,796,438	152,796,438
4	Tunjungsari	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250

NO	KECAMATAN / DESA	RINCIAN ADD PER DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7
5	Blimbingwuluh	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
6	Pait	548,186,000	137,046,500	137,046,500	137,046,500	137,046,500
7	Tengengkulon	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
8	Rembun	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
9	Yosorejo	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
10	Siwalan	485,176,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000
11	Boyoteluk	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
12	Depok	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
13	Blacanan	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
	<b>KARANGDADAP</b>	-	-	-	-	-
1	Logandeng	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
2	Jrebengkembang	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
3	Pagumenganmas	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
4	Kedungkebo	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
5	Kaligawe	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
6	Karangdadap	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
7	Kalilembu	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
8	Pangkah	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
9	Kebonrowopucang	485,176,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000
10	Kebonsari	485,176,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000	121,294,000
11	Pegandon	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
	<b>WONOKERTO</b>	-	-	-	-	-
1	Wardi	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
2	Rowoyoso	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
3	Bebel	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
4	Wonokerto wetan	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
5	Sijambe	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
6	Pesanggrahan	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
7	Pecakaran	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
8	Api-api	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
9	Wonokerto kulon	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
10	Tratebang	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
11	Semut	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>103,550,350,750</b>	<b>25,557,557,655</b>	<b>25,557,557,655</b>	<b>25,557,557,655</b>	<b>25,557,557,655</b>